

DISKURSUS POLITIK LOKAL

DISKURSUS POLITIK LOKAL

Oleh:
MAX REGUS



Copyright @ 2015 Max Regus
DISKURSUS POLITIK LOKAL

Penulis: MAX REGUS
Design Cover/Tata Letak: Willy Keraf (emasia)
Foto Cover: Search by Google

Penerbit:
SUNSPIRIT FOR JUSTICE AND PEACE
Baku Peduli Centre, Jl. Trans-Flores KM 7,
Watu Langkas, Nggorang, Komodo
Indonesia
www.sunspiritindonesia.com

THE INSIGHT INSTITUTE
Initiative and Sincerity for Humanity
Jln. Komodo, Gang Inpres Woang, RT 013/RW. 005,
Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong
Manggarai, Flores, NTT
Telpon (0385) 22815
Email: theinsightinstitute14@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit

ISBN : 978-979-18706-7-2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	ix
Pengantar Cypri Jehan Paju Dale	xiii
Desentralisasi Sebagai Portofolio Politik	
Pasca Orde Baru	1
Tinjauan singkat	1
Kerangka Kerja Demokrasi	2
Portofolio Politik	12
Multi-Efek Desentralisasi	22
Kata Akhir	25
Desentralisasi, Partisipasi Dan	
Inklusivisme Politik	29
Prakata	29
Partisipasi Sosial	31
Inklusi Sosial (politik)	43
Catatan Penutup	49
Lokalisme Politik dan Ambisi	
Kesejahteraan Sosial	53
Pendahuluan	53
Hipotesis Alternatif	56
Preferensi Lokal	61
Rekonstruksi Paradigma	70
Penutup	76

Menggagas Desentralisme Demokratis di Indonesia	85
Prakata	85
Keadilan social	86
Keberagaman Sosial	89
Partisipasi Perempuan	99
Catatan Penutup	107
Paradoks Desentralisasi, Negosiasi Politik Lokal dan Modal Kultural	113
Pengantar	113
Ruang Paradoksal	114
Negosiasi Politik	117
Modal Kultural	124
Penutup	128
Pembangunan Lokal Dan Simptom Eksklusi Sosial	133
Catatan Pendahuluan	133
Simptom eksklusi sosial	135
Mempertajam Right to Development	139
Melampaui Dilema	143
Humanisasi Politik	147
Catatan Penutup	152

Kepemimpinan Politik Demokratis	157
Belajar dari Krisis	159
Kepemimpinan Politik Demokratis	163
Mengawal Transisi Demokrasi	169
Mendobrak Elitisme Politik	172

Kata Pengantar Penulis

Desentralisasi adalah praktek politik yang sarat ambisi. Di Indonesia, desentralisasi datang dengan kisahnyanya sendiri. Di antara pencapaian konstruktif dalam garis filosofis praktek politik ini, terdapat juga jurang kerusakan yang amat telanjang. Initerjadi akibat pendekatan dan kultur kekuasaan lokal yang korup.

Di tataran akademik, keseluruhan konstruksi desentralisasi (di Indonesia) telah menjadi bahan kajian menarik dan penting dalam lapangan studi pembangunan. Dari kajian yang cukup banyak ini, satu posisi konklusif dapat menjadi titik awal yang penting bahwa desentralisasi tidak hanya sebatas diskusi tentang kompetisi politik lokal dan seberapa banyak keuntungan ekonomis yang bisa diperoleh para elite politik lokal dari arena ini.

Ketika anda menemukan banyak teori, konsep dan terminus yang hilir mudik dalam buku ini, hal itu tidak bermaksud untuk menjadikan karya ini kelihatan lebih mentereng, melainkan terutama menunjukkan keluasaan dan kekayaan wacana desentralisasi. Dengan itu hendak dikatakan bahwa desentralisasi adalah sebuah ruang bermain, berpartisipasi dan bernegosiasi dari semua aktor demokrasi di level lokal.

Dengan sendirinya penting untuk dikemukakan bahwa aktor-aktor demokrasi lokal tidak melulu dari kelas pelaku politik dan birokrasi pemerintahan. Atau,

secara konkret dapat dikatakan bahwa desentralisasi dan demokrasi lokal tidak bergerak berdasarkan interese elite-elite lokal, tetapi juga terutama bergerak dalam kendali dan orientasi kepentingan dan partisipasi masyarakat setempat.

Buku ini secara sistematis berusaha – meskipun belum menyentuh dan membedah semua aspek penting desentralisasi dan kontur politik lokal – menyodorkan tinjauan komprehensif atas asumsi-asumsi yang berada di balik salah satu langkah politik paling penting pasca-reformasi di Indonesia. Dengan harapan, rancang bangun politik lokal, yang didukung semua elemen kunci di ranah setempat, dapat dimunculkan sebagai langkah alternatif menjadikan kemakmuran sosial sebagai pengalaman konkret publik.

Buku ini merupakan salah satu selingan ilmiah dari kesumpekan tenggelam dalam pergulatan panjang mengerjakan proyek doktoral di Belanda dalam tahun-tahun yang sedang berlangsung ini. Menulis satu dua artikel – yang berada di luar orbit proyek studi – merupakan salah satu cara ampuh untuk melawan kejenuhan sekaligus sebagai momentum melarikan diri dari rutinitas akademik yang membosankan.

Karya ini – dengan judul – *Diskursus Politik Lokal* – menjadi salah satu intermezo intelektual yang berikhtiar menyediakan informasi tambahan bagi para akademisi, pekerja politik, aktivis sosial dan masyarakat umum di level lokal untuk memperkuat basis dukungan bagi tumbuhnya politik lokal yang demokratis dan manusiawi. Secara pribadi, dengan menulis buku ini, saya memiliki harapan agar dunia intelektual-akademik memiliki jalan

komunikasi yang produktif dengan praksis dan tindakan politik untuk membangun demokrasi berada di semua ruang dan level.

Hingga buku ini ada di tangan Anda, ada banyak pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam hari-hari yang telah lampau dalam pengembaraan akademik yang kadang melelahkan. Untuk percayaan dan dukungan dari Mgr. Hubertus Leteng, pimpinan Keuskupan Ruteng, Flores, saya menghaturkan rasa terima kasih. Saya berterima kasih kepada Sunspirit for justice and peace dengan para penggeraknya; terutama Cypri Jehan Paju Dale yang sekaligus memberi pengantar untuk buku ini dan Kris Bheda Somerpes yang telah membantu membersihkan naskah buku ini dari beberapa kesalahan. Terima kasih kepada Professor Herman L. Beck dan Professor Mirjam Van Versien di Graduate School of Humanities, Universitas Tilburg, yang telah membantu saya melampaui sejumlah saat sulit beberapa waktu terakhir. Saya juga banyak menerima dukungan dari komunitas akademik The Institute of Social Studies, Erasmus University, selama dua tahun, 2012 – 2014 ketika menikmati saat-saat sebagai peneliti doktoral di sana. Saya mengucapkan salam terima kasih kepada begitu banyak donator yang telah melibatkan perhatian dan cinta mereka kepada saya selama ini. Kepada Bapak Johnny Plate dan Ibu Maria Anna Soe untuk segala dukungan, kepada Bapa Thoby sekeluarga dan saudara saya Paski Mutis sekeluarga atas segala keikhlasan yang begitu menyentuh saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gail Maria Hardy dan Bapak Yongky Setjadingrat bersama

keluarga besar Komunitas Den Burgh Rijswijk Belanda untuk kenyamanan tempat bernaung. Saya berterima kasih kepada Boni Hargens yang telah tumbuh menjadi salah satu intelektual dan aktivis penting di Indonesia. Dukungan spiritual dari Pastor Jossy Erot di Flores, dan penghiburan lintas benua yang telah diperlihatkan dengan tekun oleh seorang sahabat Bengky kepada saya. Terima kasih kepada Ayahanda dan ibunda, Viktor Regus dan Theresia Jaira serta saudara-saudari saya; Mathilda-Peter, Sakarias-Veny, Valeria-Adrian dan ponakan-ponakan saya; Cecilia, Clarino, Margie, Nicholas, Declan. Saya tidak bisa menyebut semua nama di sini. Banyak sahabat telah mendukung saya dalam segenap karya dan pergulatan hidup. Buku ini saya persembahkan untuk Anda semua. Selamat membaca!

Jelang Natal 2014

Max Regus
Komunitas Den Burgh
Rijswijk-Belanda

Kata pengantar

Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat

- Cypri Jehan Paju Dale -

Desentralisasi telah menjadi salah satu mantra andalan bagi demokrasi dan pembangunan selama beberapa dekade terakhir, yang dipercaya dan diklaim bukan saja sebagai resep penyembuh untuk pemerintahan otoriter (otoritarianisme) tetapi juga jawaban untuk masalah kemiskinan. Mantra desentralisasi ini, kendati merupakan desakan dan kebutuhan internal setiap negara dan masyarakat, juga merupakan resep yang disediakan agen-agen neo-liberal seperti Bank Dunia, IMF, dan PBB sejak dua decade terakhir abad ke-20, yang dipromosikan bersamaan dengan resep-resep pembangunan kapitalistik yang bertumpuh pada liberalisasi ekonomi, investasi tanpa batas, demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka itu, juga diperkenalkan sistem pemilihan kepala daerah langsung dan resep pemerintah dan pemerintahan yang baik (*good government* dan *good governance*), dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utamanya. Dipercaya bahwa *good governnant/governance* itu akan menjalankan dengan benar resep liberalisasi ekonomi, sekaligus menjamin investasi dan pasar bebas, yang pada gilirannya menjawab masalah kemiskinan. Indonesia setelah kejatuhan Soeharto telah mengikuti semua resep itu dalam proyek otonomi daerah, percepatan dan

perluasan pembangunan (antara lain lewat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi – MP3EI), liberalisasi perdagangan, serta privatisasi dan eksploitasi sumber daya kolektif masyarakat atas nama investasi. Dalam dua dekade, pemerintahan di pusat dan di daerah telah bekerja dalam kerangka kerja neoliberal ‘pemerintahan yang baik’ demi mewujudkan pembangunan yang melayani pasar dan demi melakukan pelayanan publik. Jelas dari situ bahwa desentralisasi merupakan sebuah proses politik dan ekonomi sekaligus, yang seperti dilukiskan berbagai cendekiawan, mendekatkan kekuasaan ke tingkat lokal sekaligus memfasilitasi globalisasi ekonomi kapitalistik (Haris, et.al. 2004, Hadiz 2010).

Jelas bahwa desentralisasi merupakan metode sekaligus proses demokrasi yang berpotensi membuka peluang bagi keterlibatan aktif masyarakat lokal untuk menentukan arah masa depan mereka sendiri di bidang politik dan ekonomi. Namun, apa yang terjadi setelah (hampir) dua dekade desentralisasi? Bersamaan dengan merangsek-masuknya ekspansi investor kapitalistik ke kantong-kantong sumber daya alam di daerah-daerah, kita menyaksikan lahirnya elit-elit politik dan ekonomi baru di daerah-daerah, bersamaan dengan re-konsolidasi elit-elit politik dan ekonomi lama (dan baru) di tingkat pusat. Mereka itu membajak proses demokratisasi dalam proses desentralisasi pasca-kejatuhan Soeharto. Kendati terpilih lewat pemilihan umum yang (secara prosedural tampak) demokratis, tidak sedikit dari wakil rakyat dan kepala daerah, seperti juga pejabat-pejabat pusat, yang melakukan korupsi yang sistemik. Sampai akhir 2014,

tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah terlibat kasus korupsi (Data KPK 2014). Itu belum terhitung kasus korupsi yang belum berhasil diungkap KPK. Modus korupsi itu bukan hanya perampokan APBN dan APBD, tetapi terkait juga dengan investasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti dalam kasus korupsi terkait izin tambang (Hasiman 2014, data KPK 2014) dan korupsi di sektor kehutanan (ICW 2014, data KPK 2004). Banyak politisi yang menjadi bagian dari gurita bisnis, dan sebaliknya, banyak taipan yang sekaligus memegang posisi kunci di partai-partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolusi kepentingan kuasa politik dan ekonomi menjadi hal yang jamak. Selain itu, di daerah-daerah, seperti dalam studi kami di Manggarai Raya NTT sebagai contoh kasus, tidak sedikit dari anggota DPR yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan mafia proyek-proyek APBD dan APBN (Dale 2013). Tampaknya kesimpulan Hadiz tentang desentralisasi di Indonesia itu berlaku umum, yaitu bahwa desentralisasi telah memfasilitasi lahirnya kekuasaan yang buas (*predatory power*) di daerah-daerah (Hadiz 2010) yang berfungsi baik secara independen maupun terkoordinasi dengan mafia yang sama di tingkat nasional. Dengan beberapa pengecualian (yang perlu diteliti lebih lanjut), demokrasi lokal yang tampaknya sukses lewat terselenggaranya pemilihan kepala daerah langsung dan lewat pemilihan wakil rakyat ternyata tidak

berhasil mewujudkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terjadi justru sebuah paradoks: dalam suksesnya demokrasi prosedural tercipta sebuah oligarki atau aristokrasi (yaitu kekuasaan dan penguasaan oleh segelintir elite), sekaligus juga sebuah plutokrasi (yaitu elite yang kaya).

Bersamaan dengan paradoks demokrasi lokal itu juga kita saksikan paradoks pembangunan. Yaitu bahwa di tengah maraknya pembangunan (terutama lewat alokasi APBD dan lewat investasi serta eksploitasi sumber daya alam), terjadi proses-proses pencaplokan sumber daya alam, marginalisasi kelompok rentan, serta buruknya pelayanan publik. Pembangunan tidak saja gagal memenuhi janji akan kesejahteraan umum dan keadilan bagi semua, tetapi justru menjadi proses yang kendati mendatangkan keuntungan berlimpah bagi elite, menghasilkan pemiskinan sistemik bagi rakyat kecil (Dale 2013).

Paradoks demokrasi lokal dan paradoks pembangunan seperti itu membuat kita sadar bahwa bahwa kendati (1) membuka peluang bagi partisipasi dan self-determinasi masyarakat setempat, (2) desentralisasi atau otonomi daerah tidak dengan merta menjami kedaulatan rakyat, yaitu *tocratos* (pemerintahan) oleh *demos* (rakyat). Desentralisasi hanya menciptakan ruang yang memungkinkan demokrasi itu diperjuangkan, ruang yang sekaligus juga diincar elit predator dan pebisnis kapitalistik untuk kepentingan mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, elit-elit predator yang tumbuh subur dalam demokrasi liberal itu sekaligus juga merupakan agen-agen dari sistem ekonomi kapitalistik,

yang kendati berbicara untuk kesejahteraan umum, sesungguhnya berkepentingan untuk mengincar sumber daya publik untuk diprivatiasi dan dijadikan sumber akumulasi kapital atas nama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang dihadapi bukan semata-mata individu-individu rakus dalam diri politisi, birokrat, dan pengusaha korup dan tamak, tetapi sebuah tata ekonomi global yang dibangun atas dasar akumulasi keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli pada keadilan sosial dan kelestarian alam.

Dalam konteks itu, pergumulan demokrasi lokal bukan semata-mata pertarungan demokratis setara untuk merebut posisi politik dan birokratik tertentu (dalam pilkada atau pileg). Menempatkan orang-orang bersih, kredibel, dan siap bekerja untuk rakyat pada posisi eksekutif dan legisatif melalui pemilihan umum memang merupakan bagian penting dari pergumulan demokrasi lokal. Namun pergumulan demokrasi lokal lebih dari itu. Pergumulan demokrasi lokal adalah pertarungan menegakkan kedaulatan rakyat dan mempertahankan kepentingan umum, menjamin *survival, wellbeing, dan dignity* masyarakat umum.

Dalam gerakan emansipasi itu, para politisi, birokrat, pengusaha, aktivis, agamawan, budayawan, ilmuwan, dll tidak dengan serta-merta merupakan kawan seperjuangan. Dapat saja mereka justru merupakan serigala berbulu domba, yaitu kekuatan anti-demokrasi, yang merampas tidak saja uang rakyat dan sumber daya alam kolektif, tetapi juga merampas kedaulatan rakyat, dan hak mereka untuk turut serta menentukan arah masa depan bangsa dan negara. Perjuangan

demokrasi itu sekaligus politis dan epistemik. Yaitu mencegah dan melawan hegemoni yang bekerja lewat pengetahuan dan lewat struktur-struktur relasi kuasa dominasi; dan mewujudkan lewat pengetahuan kritis dan tindakan politis, sebuah tata politik, ekonomi, dan budaya transformatif, di mana solidaritas, keadilan, kesejahteraan umum menjadi proses sekaligus tujuan utamanya. Dalam arti itu pergumulan demokrasi lokal adalah sebuah gerakan emansipasi.

Buku *Diskursus Politik Lokal* karya cendekiawan-rohaniwan-aktivis Max Regus ini penting bukan saja sebagai sebuah *analisis teoritik kritis tentang dinamika demokrasi pasca-desentralisasi*, tetapi juga sebagai sebuah energi penguat bagi pergumulan para pelaku demokratisasi lokal di Indonesia. Sampai sejauh ini khasanah berbahasa Indonesia menderita kekurangan buku bermutu terkait dengan demokrasi, lebih lagi demokrasi lokal. Karena itu kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi diskursus kritis tentang demokrasi lokal, diskursus dalam pengertian Foucauldian, yaitu sebagai konsep sekaligus praksis, yang karena ciri kontra-hegemoniknya dapat berkontribusi bagi emansipasi politik.

Dari segi tema, buku ini tidak hanya membahas desentralisasi sebagai portofolio politik pasca-orde baru dengan seluruh dinamikanya yang menciptakan ruang artikulasi yang luas bagi masyarakat lokal, tetapi juga mengangkat tema-tema kunci seperti partisipasi, inklusi

sosial dan politik, konsolidasi kekuatan lokal untuk perubahan, alternatif pembangunan, kepemimpinan demokratis, dan berbagai prinsip dan strategi perwujudan keadilan sosial. Berbeda dengan fragmen-fragmen pemikiran politik banyak penulis di media masa populer dewasa ini, buku ini tidak membahas demokrasi lokal sebagai komentar atas fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian. Justru buku ini mengajak pembaca untuk masuk lebih dalam melampaui gejala politik di permukaan dan mendiskusikan tema-tema kunci yang memungkinkan pemikiran dan praksis transformatif tentang demokrasi lokal.

Keunggulan lain buku ini adalah pergaulannya yang luas dan intim dengan konsep-konsep, penelitian-penelitian, diskusi-diskusi kunci dan terkini dari cendekiawan terkemuka lintas-disiplin dalam jurnal akademik dan buku-buku berbahasa Inggris; sebuah karya intelektual yang jarang dilakukan oleh para penulis dan komentator politik Indonesia.

Selain pemikiran teoritik-filosofis, kajian kontemporer tentang demokrasi dan politik pada umumnya juga banyak belajar dari pergumulan konkret dan pengetahuan kontekstual (*embedded knowledge*) masyarakat lokal dalam konteks sosial-politik-ekonomi-kultural tertentu. Situasi, peristiwa-peristiwa, dan konteks tertentu mempengaruhi dinamika politik, dan dari dinamika itu kita dapat belajar banyak tentang demokrasi sebagai sebuah prinsip dan proses

emansipasi. Selain buku ini, Pembaca yang serius dianjurkan untuk membaca berbagai hasil penelitian dalam *Democratizing Democracy: Beyond the Liberal Democratic Canon* (diedit de Sousa Santos, 2007) dan *Politicising Democracy: Local Politics and Democratization in Developing Countries* (diedit Harris, J., Stokke Kristian dan Olle Tornquist, 2004). Salah satu ciri generik yang paling relevan dari semua kajian itu adalah bahwa mereka belajar dari gerakan demokrasi versi masyarakat untuk mencari alternatif atas paradox demokrasi liberal-representatif, dan memikirkan alternatif-alternatif bagi pendemokrasian demokrasi, sebuah upaya menjadikan demokrasi sebagai yang benar-benar secara substansial dan signifikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; dan bukan sekadar penguasaan oleh elit yang terpilih lewat pemilu yang secara prosedural demokratis.

Saya sendiri menaruh minat pada gerakan sosial-politik lokal di Indonesia yang dalam menghadapi paradoks demokrasi pada zaman otonomi daerah membangun gerakan perlawanan yang sekaligus membuka topeng tipu daya demokrasi representatif dan liberal, serta mengedepankan praktek-praktek demokrasi yang menekankan solidaritas, partisipasi, dan deliberasi. Gerakan-gerakan itu tumbuh di berbagai tempat sebagai reaksi atas dominasi dan pencaplokan sumber daya alam serta marginalisasi yang dilakukan dan atau difasilitasi oleh pemimpin daerah dan wakil rakyat yang terpilih lewat pemilihan umum. Di Manggarai Raya, NTT, misalnya gerakan berbasis Gereja aktif mengkritisi praktek manipulasi dalam

pemilu serta memobilisasi masyarakat untuk memilih para calon kepala daerah dan legislatif yang memenuhi kriteria-kriteria etis tertentu, seperti kepedulian dan solidaritas, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, serta keberanian untuk menolak industri tambang yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat kecil. Selain itu gerakan-gerakan orang muda aktif menentang privatisasi sumber daya publik serta investasi yang melibatkan gurita bisnis para politisi, termasuk politisi nasional. Muncul juga gerakan advokasi di sektor kesehatan, BPKD di Manggarai Barat, yang melakukan kegiatan demi membangun ‘masyarakat aktif, pemerintahan responsif’, sebuah upaya untuk melibatkan diri dalam tata pemerintahan dan keputusan terkait pembangunan. Selain itu asosiasi jurnalis juga aktif, tidak saja aktif menulis reporatase, tetapi melakukan demonstrasi untuk mengungkap berbagai kasus korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan lembaga penegak hukum sekaligus. Sementara itu di Papua, sudah lama berkembang gerakan-gerakan demokrasi berbasis masyarakat adat, lembaga agama, dan LSM, yang tidak saja mengkritisi dominasi dan eksploitasi politik dan ekonomi oleh negara dan korporasi, tetapi memperjuangkan emansipasi dan self-determinasi dalam wujud sistem politik dan ekonomi yang menjamin survival, welbeing, dan dignity orang asli Papua. Sambil mengakui pentingnya pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang didengungkan oleh kaum liberal, gerakan emansipasi ini memperjuangkan kosmovisi dan tata sosial-politik-ekonomi yang berbasis penghormatan,

perlindungan, dan keberpihakan khusus kepada masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan.

Dalam diskursus demokrasi arus utama, gerakan-gerakan masyarakat seperti itu tidak diakui sebagai aktor dan dinamika demokrasi, dan seringkali dianggap sebagai protes belaka, yang kadang-kadang didengar (lewat proses hearing atau audiensi), tetapi lebih sering justru dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan dan stabilitas, dan karena itu seringkali dibungkam, termasuk dengan menghadapkan mereka dengan pasukan keamanan. Sementara itu yang dianggap sebagai proses demokratis hanyalah negosiasi-negosiasi dalam ruang tertutup antara eksekutif dan legislatif, bersama dengan mitra-mitra bisnis mereka.

Masa depan demokrasi menurut saya terletak pada usaha kita memperluas canon demokrasi di luar trias-politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan melampaui praktek demokrasi representatif yang sempit. Gerakan-gerakan sosial itu justru merupakan wujud nyata dari praktek demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, lewat usaha-usaha mereka yang mengedepankan solidaritas, partisipasi, dan deliberasi.

Kendati merupakan bahasan teoritik, dan bukan studi lapangan tentang dinamika demokrasi lokal di Indonesia, buku ini jelas penting untuk mendorong diskursus kritis dan emansipatif tentang demokrasi di tanah air. Salah satunya adalah dengan menjembatani diskursus demokrasi lokal di Indonesia dengan diskursus-

diskursus serupa di tataran internasional. Manfaat lain adalah buku ini menjadi semacam pemandu bagi penelitian lapangan tentang demokrasi lokal, pemandu dari segi tema, konsep, dan pendekatan.

Kita berharap buku ini dibaca dan didiskusikan secara luas di kalanganakademia, politisi, birokrat, aktor gerakan sosial, dan masyarakat umum. Bagi para cendikia buku ini membuka pintu bagi pergaulan dengan konsep-konsep dan literatur-literatur kunci dari negara-negara lain tentang demokrasi dan politik lokal, dan diharapkan dengan itu memperkaya diskursus kritis di Indonesia. Bagi para politisi dan birokrat, buku ini menjadi alat bantu baik dari segi keilmuan, etika kekuasaan, maupun sebagai panduan kebijakan. Bahwa berpolitik dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi bukan hanya urusan merebut kuasa dan mengelola anggaran pembangunan; melainkan mandat untuk kerja emansipasi. Sedangkan bagi gerakan-gerakan sosial, buku ini dapat menjadi sebuah cermin untuk menemukan kerangka bagi gerakan-gerakan emansipasi mereka, kerangka yang membuat mereka bergumul lebih jauh dan menuntaskan agenda demokrasi di mana rakyat berdaulat dan kesejahteraan umum semakin terwujud.

Baca Sudab!

DAFTAR PUSTAKA

Beetham, D. (1992) 'Liberal Democracy and the Limits of Democratization', *Political Studies*, 40, Supplement 1, pp. 40–53

Dale, C. J.P. (2013) *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik*, Flores: Sunspirit Books.

Fishkin, James (2009) *When People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*, Oxford: OUP.

Habermas, J. (2005) "Concluding Comments on Empirical Approaches to Deliberative Politics" *Acta Politica* 40 no. 3, pp. 384-392.

Habermas, J. (2013) *Democracy, Solidarity and the European Crisis*, Lecture delivered by on 26 April 2013 in Leuven University.

Hadiz, Vedi (2010) *Localising Power In Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, CA: Stanford University Press.

Harris, J., Stokke Kristian dan Olle Tornquist (ed) (2004) *Politicising Democracy: Local Politics and Democratization in Developing Countries*, London: Palgrave MacMillan.

Hasiman, F (2014) *Monster Tambang*, Jakarta: JPIC OFM Indonesia.

Pusat Data KPK, *Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014*, <http://acch.kpk.go.id/statistik>, diakses 5 Januari 2015.

Santos, B.d.S., ed, (2007) *Democratizing Democracy: Beyond the Liberal Democratic Canon*, London: Verso.

